1-31-2006

Kebutuhan Perangkat Hukum Nasional dan Internasional dalam Rangka Penataan Dirgantara Nasional

Priyatna Abdurrasyid

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>

Recommended Citation

Abdurrasyid, Priyatna (2006) "Kebutuhan Perangkat Hukum Nasional dan Internasional dalam Rangka Penataan Dirgantara Nasional," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 3 : No. 2 , Article 1.

DOI: 10.17304/ijil.vol3.2.394

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol3/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kebutuhan Perangkat Hukum Nasional dan International dalam Rangka Penataan Dirgantara* Nasional

H. Priyatna Abdurrasyid**

The need of space strategy, whether in land, in territorial water, in air or outer space, oftentimes oppose against commercial and academic need. In the other hand, also happened opposition among the need of sovereignty of international regime and territorial,

* Istilah Dirgantara telah dibakukan oleh TNI-AU sejak 1950-an dan diklasifikasikan dalam Ruang Udara dan Antariksa. Dalam forum Internasional, istilah yang digunakan adalah "UNIVERSE", "COSMOS", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "JAGAD RAYA" dan dimana diketemukan Tata Surya (*solar system*, yang jumlahnya tidak dapat diukur). Arti Dirgantara sebenarnya adalah "dirga" dan "antara" (antara 2 gunung) sedangkan Antariksa artinya antara 2 angin yang diambil dalam bahasa Sangskrit. Kata Antariksa diartikan sebagai Ruang Angkasa (*Space*) dengan segala isinya, yakni berbagai bentuk planet. Menurut penulis untuk saat awal kini, manusia baru mampu memanfaatkan secara terbatas, Ruang Udara (*Airspace*) yang berada di sekitar Bumi kita dalam atmosfer BUMI ruang berisikan gas-gas udara dan baru sampai setitik di Ruang Angkasa yang kosong/hampa udara (*Outer Space*) yang secara teknis ilmiah di forum Internasional diberi istilah "*air and space*" atau "*aerospace*" atau "angkasa" (terdiri dari ruang udara dan ruang angkasa).

Tulisan ini dibuat di Jakarta, 16 Januari 2006.

** Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, Ph.D, FCI Arb., FHK Arb., FCBArb C.IISL, D.IAA., Fell.BIS., LAA. adalah seorang pengajar Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa (*Air and Space Law*) di dalam dan luar negeri, serta seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau merupakan *Honorary Director, Institute of Space Law, Paris – France, Panel of Legal Expert, ICAO, Montreal – Canada, dan Panel of Legal Expert, INTELSAT, Washington, DC, USA*. Selain itu, Beliau juga aktif di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan termasuk dalam Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

which want the existence of an international rule, which specify delimitation between National and International space. The need of strategy national sovereignty is a maximum height of national air. On the contrary, the need of international society is a rule of law which limit the minimum of the National Air Space broadness. In the end, sovereignty demand to Space prohibited by Article II Space Treaty 1967. However, state have jurisdiction to ship, airplane, installations, spaceship, which beyond its region, in international region, when the appliances have mentioned state nationality (based on Lotus Case 1926).

Stephen Gorove, seorang ahli hukum Angkasa terkemuka dari USA berkata bahwa:

"He who controls the Cosmic Space, rules not only the Earth, but the whole Universe".¹

Bandingkan dengan pernyataan McKinder sebelumnya, sebagai berikut:

*"Who rules East Europe, commands the Heartland
Who rules the Heartland, commands the World – Island
Who rules the World – Island, commands the World".²*

Secara langsung dan tidak langsung, pernyataan Gorove sejak lama telah diterapkan, misalnya dalam cerita-cerita Yunani tentang Icarus dan Daedalus, Gatotkaca, Suntze, dan Leonardo Da Vinci. Kemudian oleh Bismarck dalam Perang Perancis – Prussia 1870–1871; Perang Dunia Pertama oleh Spaight; Perang Dunia Kedua

¹ Gorove, Stephen, *the Law of Space*, Mississippi – USA, 1978.

² *Ibid.*

oleh White, Mitchell, dan kini dipraktekkan oleh USA.³ Secara strategis, keterbatasan pandang di darat maupun di laut dapat diatasi oleh kemampuan di bidang ruang di atas permukaan darat dan laut. Usaha-usaha penguasaan wilayah untuk daya pandang melalui ruang udara atau ruang angkasa sejak lama telah menjadi bahan sengketa internasional. Misalnya, pengertian dan penerapan politik “*open sky*” yang tidak tepat dapat menjadi bahan sengketa dan lebih jauh menimbulkan kerugian yang tidak terkendalikan. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, menyatakan:

“Sovereignty.

The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”.

Pasal ini dimaksudkan memberi kepastian dan ketegasan wilayah ruang udara suatu negara. Ketidaktepatan atau salah tafsir beberapa ketentuan internasional, misalnya mengenai orbit geostationer⁴ dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan.

Kegiatan menata Dirgantara Nasional memerlukan pengenalan dan pengertian Hukum Internasional, misalnya tentang rezim hukum laut bebas, *arctic* dan *antarctic*. Pengertian tentang rezim-rezim tersebut yang kini berlaku berupa laut bebas, wilayah kutub, dan ruang angkasa, sampai hari ini telah berhasil dikonsolidasikan melalui berbagai ketentuan internasional yang integral. Dalam hal ini, kita berbicara tentang ruang. Itulah sebabnya, istilah yang dipakai dalam lingkup internasional, misalnya hukum yang

³ McDougal, Myres S., U.D. Haswell and Ivan A. Vlassic, *Law and Public Order in Space*, London, 1963.

⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Developing Countries and the Use of the Geostationary Orbit*, Acta Astronautica, USA, 1998. Priyatna Abdurrasyid, *The Outer Space Treaty and the Geostationary Orbit*, Annals of Air and Space Law, Vol. XII, 1987.

mengatur sebagian dari wilayah dirgantara dinamakan *Space Law*, atau **Hukum Ruang Angkasa**.

Sejak pertentangan antara John Selden dan Grotius⁵ mengenai penguasaan lautan, para ahli kemudian menyepakati bahwa permasalahan lautan pada hakekatnya berkisar pada ruang yang diisi oleh air, yang selalu bergerak dan berpindah-pindah, sedangkan ruangnya akan tetap stasioner. Kenyataan ini berlaku pula bagi ruang udara, yakni ruang yang berisikan gas-gas udara. Demikian pula halnya dengan ruang angkasa, ruang yang hampa atau kosong udara, berisikan Tata Surya dengan planet-planet.

Ciri-ciri dasar (fundamental) ruang nasional dan ruang internasional, pada hakekatnya akan menentukan sifat-sifat kewilayahannya. Misalnya ketentuan yang mengatur ruang-ruang internasional, seperti lautan bebas, *arctic*, *antarctic*, dan ruang angkasa, diliputi oleh hal-hal yang fundamental, seperti delimitasi, kedaulatan, dan yurisdiksi. Batas antara landas kontinen (*continental shelf*) dan dasar laut (*deep seabed*); batas antara laut teritorial dan lautan bebas (yang sudah jelas); batas antara ruang udara (nasional) dengan ruang angkasa (yang masih diperbincangkan); pada hakekatnya merupakan batas wilayah nasional dengan wilayah internasional. Luas landas kontinen, luas perairan teritorial, ketinggian ruang udara nasional (yang masih samar), dapat dikatakan merupakan batas antara ruang nasional dan ruang internasional. Dikatakan bahwa bentuk negara itu tiga dimensi.⁶

Secara strategis, kepentingan kedaulatan teritorial menghendaki kepastian batas-batas wilayah negara (di darat, di laut, di ruang udara, dan di ruang angkasa). Sebaliknya, rezim internasional juga menghendaki ketegasan demikian. "*Doctrine of right of self*

⁵ Grotius, *Mare Liberum*, Cap. 5.

⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Jakarta 1972.

preservation” dan “*Doctrine of necessity*”,⁷ yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 51 *Charter of the United Nations* dan “*Cooper’s Control Theory*”⁸ seperti membenarkan suatu negara melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan “.... *which have been found necessary in the interest of national security*” juga “*it becomes more and more recognized that violations of other States in the interest of self preservation are excused in cases of necessity only*”. Pelajari juga Pasal VIII *Space Treaty 1967*, yang antara lain berkata:

“... *Shall retain jurisdiction and control over such object ...*”

Di zaman Grotius, perairan teritorial hanya meliputi jarak sepennembak meriam, lalu meluas menjadi 3 mil, 6 mil, dan kini 12 mil, dengan perairan pedalaman (Indonesia) melalui prinsip wilayah nusantara (*archipelago*). Perhatikan sejarah diciptakannya ADIZ dan CADIZ⁹ yang diterapkan melalui kedua doktrin terdahulu dan ditunjang oleh *Cooper’s Control Theory*. Dapat dimengerti mengapa perkembangan melebarnya wilayah yurisdiksi negara tersebut dinamakan “*Creeping Jurisdiction*”.

Di dirgantara terjadi kebalikannya. Secara singkat, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kelompok yang berpendapat bahwa ruang udara karena sifatnya bebas (*the air freedom theory*);
2. Kelompok yang berpendapat bahwa negara berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayahnya (*the air sovereignty theory*).¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Cooper, John Cobb, *the Right to Fly*, New York, 1947.

⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, *Op. Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

Dengan sendirinya, dari kedua kelompok tadi telah berkembang berbagai teori, yang akhirnya kini tinggal satu yang diakui oleh Hukum Angkasa, yakni apa yang tercantum di dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944. Bagaimana perkembangan teori kedaulatan atas ruang udara di atas wilayah Indonesia? Kalau kita baca Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dikatakan bahwa:

“Negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah udara Republik Indonesia”.

Ketentuan ini memberi kita kesan adanya keragu-raguan pembentuk undang-undang tentang, pertama, dimana dan apa wilayah Republik Indonesia itu dan, kedua, kurangnya ketegasan dan mengulang saat yang terjadi sebelum jaman Grotius, yakni bahwa wilayah negara itu ialah udara (gas) dan bukan ruang. Alangkah baiknya kalau secara jelas dan tegas ditetapkan bahwa kedaulatan yang lengkap dan eksklusif (dan bukan penuh dan utuh) itu melekat pada ruang udara di atas wilayah daratan Indonesia dan perairan Indonesia yang menurut undang-undang Republik Indonesia merupakan perairan teritorial dan pedalaman negara Indonesia.

Sehubungan dengan masalah kedaulatan di ruang udara nasional ini, perlu pula kiranya dibahas apa yang dimaksud dengan “*open sky policy*”, dan lebih lanjut “*limited open sky policy*”. Sebenarnya, asal usul “*open sky policy*” ini ialah salah satu teori tentang pemilikan (kedaulatan) atas ruang udara jauh sebelum Konvensi Paris 1919, yakni “*the air freedom theory*”. Sejak tahun 1928 prinsip “*open sky policy*” diperjuangkan oleh USA dan Inggris yang berpendapat bahwa Kedaulatan Negara di Ruang Udara itu dibatasi paling tidak oleh hak lintas damai bagi pesawat udara asing (publik maupun sipil).¹¹ “*Open sky policy*” harus dikaitkan dengan

¹¹ *Ibid.*

penerbangan di ruang udara, komersial maupun non-komersial. Untuk ini, teliti Pasal-pasal 3, 5, 6 Konvensi Chicago 1944.

Memang seperti telah diutarakan, sejak sebelum Perang Dunia I, beberapa negara maju seperti USA dan Inggris dengan gigih telah memperjuangkan agar ruang udara milik negara lain diperlakukan sebagai "*open sky*" (mereka menganut "*the air freedom theory*" terhadap negara lain). Kiat ini dikarenakan perkembangan ilmu dan teknologi yang mereka kuasai. Usaha ini terus dilakukan sampai hari ini dan jelas selalu ditentang oleh negara-negara berkembang. Lihat saja tindakan-tindakan mereka di wilayah udara di seluruh dunia yang katanya demi keamanan negaranya. Sebaliknya, mereka menutup wilayahnya bagi negara lain.

Perhatikan ADIZ dan CADIZ. Kiranya pengertian "*open sky*" maupun "*limited open sky*" perlu diluruskan dan dikembalikan kepada proporsinya yang semula, tidak perlu dan akan merugikan kalau diberi tafsiran lain. Cukup kita berpedoman kepada Konvensi Chicago 1944 Pasal 1 tentang Kedaulatan; Pasal 3 c yang berbunyi:

"No state aircraft of a contracting state shall fly over the territory of another state or land there on without special authorization by special agreement"

Pasal 5 tentang "*Right of Non-Scheduled Flight*"; Pasal 6 tentang "*Scheduled Services*"; Pasal 12 tentang "*Rules of the Air*". Selanjutnya, pelajari juga "*Air Transport Agreement*" dan "*Air Services Transit Agreement*" 1944. Jangan pula diabaikan Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-undang No. 15 Tahun 1992.¹²

Prinsip "*open sky*" tidak pernah diterapkan di ruang angkasa. Ruang angkasa itu:

¹² *Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944.*

"shall be free for exploration and use by all states without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law"; is not subject to national appropriation by claim of sovereignty ... or by any other means".¹³

Walaupun ketentuan mengatakan bahwa ruang angkasa ini "free", artinya bebas untuk digunakan, ada larangan-larangan tertentu misalnya menempatkan senjata daya rusak masal, dilarang melakukan pencemaran, dan lain-lain. Bahkan kini sampai begitu jauh dalam perkembangan akibat *Direct Broadcasting Satellite* (DBS) dan *remote sensing*, ada kehendak dari negara-negara berkembang agar tidak dibenarkan adanya "*dissemination of data*" dan kalau ada harus melalui "*prior consent*".

Sebelum risalah tentang dirgantara ini dilanjutkan, marilah ditinjau komponen-komponen di wilayah negara Indonesia. Seperti dikatakan, bentuk negara itu 3 dimensi, terdiri dari wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah ruang udara; adanya orbit geostationer (terletak di atas garis Khatulistiwa pada jarak ketinggian ± 36.000 km yang terletak di atas Indonesia sepanjang 12,8% atau ± 33.000 km) sebagai wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidup Indonesia.

Kita tinjau wilayah daratan Indonesia yang terdiri dari sekian banyak pulau-pulau atau "*islands*" yang berasal dari kata latin *insula* – *insulatus*; artinya terisolasi atau terasing. Wilayah Indonesia terdiri bukan saja dari pulau-pulau, akan tetapi di pulau-pulau tersebut pun didapati rawa-rawa, hutan-hutan, pegunungan, sungai-sungai dan dikelilingi oleh air (lautan). Dengan bertitik tolak kepada keadaan fisik negara Indonesia maka tentunya strategi pengamatannya harus disesuaikan dengan keadaan geografi tersebut.

¹³ Treaty on Principles Concerning the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967. Priyatna Abdurrasyid, *Future of Space Law*, Proceeding IISL, Anaheim, 1977. Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum Angkasa dan Space Treaty 1967*, Jakarta 1976.

Kita mengenal berbagai bentuk “warfare”, misalnya *land warfare*, *mountain warfare*, *desert warfare*, *arctic – antarctic warfare*, *sea warfare*, *air warfare* dan *space warfare*. Dengan melihat keadaan fisik negara kita yang berbentuk “*archipelago*”, apakah tidak seyogyanya dipikirkan suatu bentuk pengamanan ruang negara kita dengan menciptakan “*archipelagic warfare*”.¹⁴

Sekarang tentang orbit geostationer (GSO) yang perkembangannya sebagai berikut. Orbit geostationer (GSO) merupakan bagian dari ruang angkasa (*Outer Space*). Seperti diketahui, dirgantara terdiri dari sekian banyak Tata Surya (*Solar System*). Bumi kita terletak di salah satu Tata Surya dengan matahari sebagai pusatnya. Bumi dilapisi oleh atmosfer atau ruang udara, sehingga memberi kemampuan kepada manusia dan makhluk lainnya untuk hidup. Di luar atmosfer, terletak ruang angkasa yang hampa atau kosong udara (*gas*). GSO terletak di ruang angkasa dan merupakan bagian dari ruang angkasa tersebut.

GSO ditemukan oleh sarjana Arthur Clarke, seorang Inggris yang bermukim di Colombo (lihat bukunya yang berjudul *Ascent to Orbit*). Dr. Clarke telah menulis buku tentang *Outer Space* sebanyak lebih dari 60 buah, dimana ia membahas *Outer Space* secara teknis, hukum, dan fiksi. Sejak Rusia berhasil meluncurkan satelitnya pada 1957, pemanfaatan ruang angkasa dan GSO dilakukan oleh negara-negara maju melalui prinsip “*first come first served*”. 2/3 kegiatan negara-negara maju diarahkan kepada kegiatan militer. Prinsip “*first come first served*” dirasakan sangat mengganggu oleh negara-negara berkembang, walaupun mereka belum mampu memanfaatkan orbit tersebut.

Pada pertemuan IAF (*International Astronautical Federation*: terdiri dari IAA – *International Academy of Astronautics*, dan IISL – *International Institute of Space Law*) di Amsterdam pada 1974 (IAF, IAA dan IISL bermarkas di Paris dan merupakan badan swasta internasional), pihak Indonesia telah mengusulkan agar

¹⁴ Istilah “Warfare” tidak diartikan dengan “PERANG”, akan tetapi sebagai suatu sistem pengamanan yang terbatas kepada kemampuan “DAYA PIKIR” (*Brain Warfare*).

masalah GSO dibahas sebagai salah satu topik. Usul Indonesia tersebut ditentang oleh Ketua IAF, pada waktu itu Prof. Napolitano. Berkat dukungan Prof. Pepin dan Prof. Diederiks-verschoor (masing-masing dari Perancis dan Belanda), topik GSO secara pro-memory diterima sebagai salah satu acara sidang IAF-IAA-IISL untuk masa-masa mendatang.

Pada Desember 1976, negara-negara yang menyebut dirinya *Equatorial Countries* (11 negara) berkumpul di Bogota – Colombia untuk membicarakan status GSO yang sampai waktu itu telah dimanfaatkan hanya oleh negara-negara maju saja secara “*first come first served*”. Dalam pertemuan di Bogota tersebut, tampak dan berkembang 2 kubu. Pertama, kubu Amerika Latin dan Afrika yang menuntut kedaulatan terhadap GSO yang ada di atas negaranya. Indonesia tidak menyetujui “*first come first served*” akan tetapi juga tidak bisa mendukung tuntutan kedaulatan, mengingat GSO itu merupakan bagian dari *Outer Space*, sesuai dengan prinsip yang tercantum di dalam Resolusi, Deklarasi PBB dan *Space Treaty* 1967 yakni **milik bersama kemanusiaan** (*Common Heritage of Mankind*).

Indonesia menginginkan HAK-HAK KEDAULATAN, artinya semua negara memperoleh bagian secara bersama-sama dari GSO tersebut. Hal ini harus didasarkan kepada:

“Principle of Full International Cooperation among states, based on equality, irrespective of their degree of their economic and technical development”.¹⁵

Walaupun Indonesia tidak sejalan pikirannya dengan negara-negara khatulistiwa lainnya, secara strategis tuntutan mereka ini kita biarkan dengan pertimbangan bahwa kalau kita perlu 10, berjuanglah untuk 100 dan syukur kalau dapat lebih dari 10.

¹⁵ *Op. Cit.*, Footnote 13.

Tuntutan internasional pertama dicanangkan pada pertemuan ITU pada Januari 1977 di Geneve. Negara Amerika Latin menuntut kedaulatan pada GSO. Sedangkan Indonesia dalam *statement* resminya selalu mengatakan bahwa marilah kita bicarakan soal GSO ini secara musyawarah, mencari penyelesaian yang menguntungkan bagi semuanya, karena GSO ini adalah milik kita bersama (*common heritage of mankind*).¹⁶

Indonesia di dalam setiap *statement* pada sidang-sidang ITU maupun UNCOPUOS selalu mengemukakan bahwa GSO itu merupakan "*the common heritage of mankind and should be utilize on a basis of equality, international cooperation of all countries*".¹⁷ Usaha-usaha Indonesia ternyata mendapat simpati yang besar, bukan saja dari negara-negara maju akan tetapi juga dari negara-negara berkembang lainnya yang bukan merupakan negara Khatulistiwa.

Dari manakah asal-usul prinsip "*first come first served*" ini? Kalau diteliti, Pasal 33 Konvensi ITU 1973, terutama kalimat "*.... according to their needs and the technical facilities at their disposal*" maka keadaannya akan menjadi jelas. Kalau ada "*needs*" akan tetapi tidak ada "*technical facilities at their disposal*", tidak akan dan tidak bisa berbuat apapun. Situasi hukum ini ternyata telah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia pada 1976, melalui operasi PALAPA I dan seterusnya.¹⁸ Perjuangan Indonesia untuk meniadakan prinsip "*first come first served*" dilakukan secara berlanjut, melalui PBB maupun badan-badan ilmiah internasional lainnya, seperti IAF-IAA-IISL. Kepincangan pada Pasal 33 Konvensi ITU 1973 ini berhasil ditiadakan, yakni melalui pertemuan UNISPACE-2 di Vienna 1982. Pasal 33 telah diubah oleh Konvensi Nairobi 1982 dan menjadi:

¹⁶ Teliti Pasal 33 Piagam PBB.

¹⁷ *Op. Cit.* Footnote 13.

¹⁸ Kita secara naif telah menjual INDOSAT ke Singapore.

“..... so that countries or group of countries may have equitable access to both, taking into account the special needs of the developing countries and the geographical situation of particular countries”.

Perjuangan negara-negara Khatulistiwa (dan Indonesia), walaupun tidak mencapai sasaran, yakni menghendaki kedaulatan atas GSO, ternyata berhasil memberi warna baru kepada Hukum Internasional khusus Hukum Ruang Angkasa (*Space Law*).

Negara-negara berkembang yang tadinya pasif terhadap perkembangan di Ruang Angkasa, sejak itu mulai ikut berbicara, bahkan negara-negara teknologi maju mulai mendengarkan pandangan-pandangan dari negara berkembang. Akhirnya, pada pertemuan WARC 1985 di Geneve, dicapai kesepakatan sebagai berikut:

- Satelit-satelit telekomunikasi yang sudah beroperasi berdasarkan prinsip “*first come first served*” tetap dilindungi (*grand-father clause*).
- Negara-negara yang belum memiliki kegiatan operasional di GSO, diberi jatah 1 slot, walaupun tidak memerlukan, tidak mampu, dan tidak menjadi soal.

Kedua pokok kesepakatan tersebut, diberi catatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akhirnya pada pertemuan IAF-IAA-IISL di Brighton, Inggris pada 1989, berbagai pendapat tentang GSO telah dapat dipertemukan secara ilmiah.

Secara nasional, pemanfaatan GSO perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Sampai dimana usaha-usaha internasional maupun nasional telah dilakukan oleh persatelitan Indonesia, khusus yang menyangkut hal-hal antara lain:

- a. Pendaftaran di dalam negeri;
- b. Persoalan masalah tanggung jawab kemungkinan terjadi kerugian terhadap pihak ketiga sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh *Liability Convention 1972* (*Convention on*

International Liability for Damage caused by Space Objects, 1972). Pasal I menyatakan:

"For the purpose of this Convention:

- (a) the term "damage" means loss of life, personal injury or other impairment of health; or loss of or damage to property of States or of persons, natural or juridical, or property of international intergovernmental organizations;*
- (b) the terms "launching" includes attempted launching;*
- (c) The terms "launching" state means :*
 - (1) a state which launches or procured the launching of a space object;*
 - (2) a state from whose territory or facility a space object is launched;*
- (d) the term "space object" includes component parts of a space object as well as its launch vehicle and parts thereof".*

Selanjutnya baca Pasal II yang menyatakan:

"A launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the Earth or to aircraft in flight".

Dari sini dapat ditarik kenyataan bahwa kerugian itu bentuknya beragam, antara lain interferensi maupun menyiarkan hal-hal yang berkaitan misalnya dengan Hak Cipta dan Paten. Kerugian yang berkaitan dengan hak cipta/paten tersebut dilandasi oleh **Bogsh** atau *footprint theory* (bagi siaran TV dan radio).

Bagaimana kalau kegiatan persatelitan itu dilakukan atas kerja sama negara dengan swasta. Perlu diperhatikan oleh para pemakai/pemilik satelit yang beroperasi adanya suatu persyaratan, yakni *"pre-emptory right clause"*, artinya andaikata terjadi *breakdown* pada salah satu *transponder* milik negara, apakah tidak seyogyanya diganti oleh *transponder* milik swasta tadi, mengingat kepentingan negara (kepentingan umum). Kerugian semacam ini

dapat diatasi melalui suatu sistem perasuransian yang jumlahnya dapat dirundingkan bersama. Apalagi adanya ketentuan, bahwa siapapun yang mengoperasikan persatelitan, sesuai dengan Pasal VII *Space Treaty* 1967, yang bertanggung jawab tetap dan dapat dituntut hanya negara dan bukan swasta misalnya si pemilik satelit (catat: INDOSAT). Lihat isi Pasal VII tadi:

"Each State Party that launches or procures the launching of an object into outer space is internationally liable for damage"

Penutup

Dalam usaha menangani strategi kedirgantaraan ini, timbul kepermukaan kenyataan sebagai berikut:

1. Kepentingan strategi ruang, apakah di darat, di perairan, maupun di dirgantara (Ruang Udara dan Ruang Angkasa) seringkali bertentangan dengan kepentingan ilmiah dan komersial.
2. Ketentuan tentang delimitasi menunjuk kepemecahan rezim Ruang Nasional dan rezim Ruang Internasional.
3. Pertentangan antara kepentingan kedaulatan teritorial dan rezim internasional menghendaki adanya suatu ketentuan internasional yang menetapkan delimitasi antara Ruang Nasional dan Ruang Internasional.
4. Walaupun setiap negara itu berhak menetapkan batas-batas wilayah nasionalnya akan tetapi suatu delimitasi unilateral itu akan terkena oleh pembatasan-pembatasan tertentu.
5. Delimitasi dirgantara sejak lama telah merupakan Hukum Internasional yang kontroversial, misalnya batas-batas Ruang Angkasa tergantung dari luas Ruang Udara (Nasional). Oleh karena itu, dimana permukaan wilayah nasional (di darat dan perairan), diatasnyalah wilayah udara nasional.
6. Kepentingan strategi kedaulatan nasional menghendaki suatu ketinggian maksimum wilayah udara nasional. Sebaliknya,

kepentingan masyarakat internasional menghendaki suatu ketentuan hukum yang membatasi secara minim luasnya Ruang Udara Nasional.

7. Hukum Internasional melarang kegiatan pemilikan terhadap lautan bebas, wilayah kutub dan Ruang Angkasa. Larangan ini merupakan hukum dasar rezim ruang internasional. Akan tetapi ke dalam, kedaulatan terhadap Ruang Udara Nasional memberi dampak dalam hukum internasional, antara lain eksklusivitas negara lain dari wilayah teritorial dan tanggung jawab atas wilayah nasionalnya.
8. Tuntutan kedaulatan terhadap Ruang Angkasa dilarang oleh Pasal II *Space Treaty* 1967. Akan tetapi negara memiliki yurisdiksi terhadap kapal, pesawat udara, instalasi-instalasi, pesawat Ruang Angkasa yang berada di luar wilayah, di wilayah internasional, bilamana alat-alat tersebut memiliki kebangsaan negara tadi (*Lotus Case* 1926).
9. Berkaitan dengan penggunaan kekerasan di Ruang Angkasa, Pasal 2, 4 Piagam PBB menyatakan bahwa setiap bentuk tindakan kekerasan dilarang. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 51 Piagam tersebut, hak mempertahankan diri dapat terjadi sampai Ruang Angkasa, apalagi bila dikaitkan dengan doktrin "*right of self-preservation*" dan "*necessity*".
10. Yurisdiksi eksklusif negara bendera menentukan imunitas alat-alat, terutama di Ruang Angkasa, dari intervensi negara lain.
11. *Nuclear Test Ban Treaty* 1963 berlaku di Ruang Angkasa, sedangkan Pasal IV *Space Treaty* 1967 melarang penempatan senjata-senjata nuklir di benda-benda angkasa. Penggunaan personil militer dibenarkan.